



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN
KEPALA BMKG RI DAN KEPALA BNPP/BASARNAS RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : Ke - 2
Jenis Rapat : RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023
Waktu : Pukul 13.15 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI
- Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si (F-PDIP) – Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2022;
2. Membahas RKA K/L TA 2024 BMKG dan BNPP/Basarnas dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024;
3. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
27 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
7 dari 12 orang Anggota
 1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
 2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
 3. Ir. Sudjadi
 4. Sri Rahayu
 5. Ir. Effendi Sianipar
 6. Harvey B. Malaihollo
 7. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H.
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
3 dari 8 orang Anggota
 1. Drs. Hamka B Kady, M.S.
 2. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
 3. Muhammad Fauzi, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
4 dari 7 orang Anggota
 1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
 2. Ir. Sumail Abdullah
 3. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
 4. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
1 dari 6 orang Anggota
 1. Drs. H. Tamanuri, M.M.
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)
3 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.
 2. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
 3. H. An'im Falachudin Mahrus
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
3 dari 5 orang Anggota
 1. Willem Wandik
 2. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.
 3. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS)
3 dari 5 orang Anggota
 1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
 2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
 3. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)
2 dari 4 orang Anggota
 1. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
 2. Mesakh Mirin, SKM.
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)
1 dari 2 orang Anggota
 1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Kepala BMKG RI (Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.),
2. Plt. Kepala BNPP/Basarnas RI (Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, dan
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI,
Yang saya hormati Kepala BMKG beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat Plt. Kepala Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan beserta seluruh jajarannya,
Hadirin yang berbahagia,**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan kasih-Nya kita kembali diperkenankan untuk dapat bertemu kembali. Setelah sekian lama kita jeda rapat ya karena kami juga melewati masa reses dan hari ini kita lanjutkan untuk mengadakan rapat terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Tahun 2024.

Informasi dari sekretariat, telah hadir 20 Anggota dari 5 atau dari 6 unsur fraksi yang berbeda maka sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat ini sudah memenuhi kuorum dan izinkanlah kami membuka rapat pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) rapat dengar pendapat ini, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.15 WIB)

Terima kasih kami sampaikan kepada,

**Kepala BMKG dan beserta seluruh jajaran ya, dan
Plt. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas
beserta seluruh jajarannya, dan
Pimpinan serta Anggota Komisi V yang saya hormati,**

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan Badan Anggaran DPR RI tanggal 12 Juli 2023 perihal Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2022 dan Rancangan Jadwal Pembahasan untuk Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun 2024, maka hari ini Komisi V DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan mitra kerja dengan agenda membahas LKPP APBN Tahun 2022 dan RKA K/L dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024 dengan mitra kerja Komisi V yaitu Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas.

Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan BPK terhadap LKPP Tahun 2022, BMKG mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Kita kasih *applause* lah buat BMKG ya. Demikian pula dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terkait dengan agenda pembahasan

RKA K/L. Basarnas berarti WTP juga, Pak, ya? Kita kasih tepuk tangan juga buat Basarnas.

Terkait dengan agenda pembahasan RKA K/L dalam Nota Keuangan RAPBN tahun 2024, BMKG memperoleh anggaran sebesar 2,77 triliun yang digunakan untuk program dukungan manajemen dan program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisik sedangkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas mendapat alokasi anggaran 2,09 triliun yang digunakan untuk program dukungan manajemen serta program pencarian dan pertolongan pada kecelakaan dan atau bencana.

Dalam kesempatan RDP ini, perlu kiranya kita bangun kesepahaman bersama bahwa rapat kerja hari ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2024 yang telah kita laksanakan pada bulan Juni yang lalu. Selain itu, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa tugas komisi dalam bidang anggaran meliputi pembahasan dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian atau lembaga yang menjadi mitra kerja komisi dan mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN.

Oleh karena itu, pada Raker atau RDP hari ini ya, Komisi V DPR RI hendaknya mendapatkan penjelasan secara komprehensif dan lengkap ya baik dari BMKG maupun dari Basarnas terkait dengan dua agenda rapat itu yaitu laporan LKPP APBN Tahun 2022 dan RKA K/L dan nota keuangan RAPBN Tahun 2024.

Demikian pengantar rapat ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada BMKG terlebih dahulu. Silakan Ibu untuk menyampaikan paparan rapat sesuai dengan undangan dan materi rapat yang sudah kami sampaikan. Saya persilakan.

**KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA RI
(Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):**

Terima kasih sekali.

**Bapak Pimpinan Komisi...Bapak Ketua Komisi V DPR RI, serta
Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati dan juga kami
juga apa kepada,
Bapak Plt. Kepala BNPP beserta seluruh jajarannya,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Izin, Bapak Ketua, kami sampaikan laporan keuangan pemerintah pusat APBN Tahun Anggaran 2022 beserta RKA K/L Tahun Anggaran 2024 BMKG dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024. Mohon izin kami mulai dari LKPP terlebih dahulu untuk Tahun Anggaran 2022. Jadi secara total di

Tahun Anggaran 2022 dari target 2,843 triliun terealisasi 84,33% yaitu sebesar 2,398 triliun. Hal ini terjadi penurunan dibandingkan di Tahun Anggaran 2021 yang realisasinya adalah 2.462.938.152.517 atau 2,462 triliun yaitu 84,84% dari pagu 2,903 triliun.

Hal tersebut juga bisa kita lihat di sini meskipun ada penurunan dari segi realisasi untuk belanja. Namun, untuk PNBPN terdapat kenaikan dari realisasi yang di tahun 2021 targetnya 70,867 miliar terealisasi 6,5377 miliar atau 92,25% dan ini naik di Tahun Anggaran 2022 dari target 102,070 miliar terealisasi 152,902 miliar atau realisasi meningkat dari 92,25% menjadi 149,80%, ini terutama karena makin meningkatnya lalu lintas di bandara, jadi dari kegiatan penerbangan.

Kemudian untuk laporan neraca, *slide* berikutnya. Iya, aset lancar BMKG Tahun Anggaran 2022 sebesar 209...209,014 miliar terdiri dari belanja dibayar dimuka, kemudian juga uang muka, juga pendapatan yang masih harus diterima, piutang bukan pajak, dan persediaan atau suku cadang dan lain-lain. Kemudian untuk aset tetap BMKG sebesar untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar 6,893 triliun terdiri dari tanah kantor pusat dan UPT kurang lebih sebesar 3,449 triliun. Kemudian peralatan penunjang operasional MKKUG dan administrasi sebesar 6,092 triliun, gedung dan bangunan kantor sebesar Rp1,489 triliun, jalan irigasi dan jaringan sebesar kurang lebihnya Rp192 miliar, dan aset tetap lainnya sebesar Rp13,186 konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp842,6 miliar, dan akumulasi penyusutan, mohon maaf, akumulasi penyusutan sebesar kurang lebih 5,186 triliun. Ini yang kami sampaikan.

Kemudian untuk aset lainnya di Tahun Anggaran 2022 tercatat sebesar 20,416 atau 417 miliar terdiri dari aset tak berwujud dan aset lain-lain. Dan berikutnya adalah kewajiban jangka pendek Tahun Anggaran 2022 sebesar kurang lebih 300, mohon maaf, saya ulangi Rp13,523 miliar terdiri dari tunggakan gaji serta tunggakan listrik, telepon, dan air serta terjadi penambahan ekuitas. Jadi kesimpulannya telah terjadi penambahan ekuitas sebesar kurang lebih Rp131,457 miliar dari jadi ini kenaikan sebesar tersebut dari Rp6,978 triliun pada Tahun Anggaran 2021 menjadi Rp7,109 triliun pada Tahun Anggaran 2022.

Kemudian *slide* nomor 7 untuk laporan operasional periode 31 Desember 2022 dan 2021. Pendapatan operasional BMKG di tahun 2021 sebesar 61, mohon maaf, sebesar 61,923 miliar ini mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 42,158 miliar menjadi sebesar Rp104,082 miliar atau peningkatan kenaikan sebesar 68,083%. Dan beban kegiatan operasional di sini dari tahun 2021 sebesar 2,1 triliun menjadi 2,1 maaf saya ulangi, dari 2,171 triliun menjadi di tahun 2022 menjadi 2,165 triliun artinya mengalami penurunan sebesar kurang lebih 5,689 miliar atau sebesar 0,262%.

Dan terjadi pula untuk defisit kegiatan operasional dari tahun 2021 sub defisit sebesar 2,109 di sini triliun menjadi 2,061 triliun di tahun 2022. Artinya ada penurunan defisit dalam kegiatan operasional sebesar Rp47,848 miliar atau penurunan defisit kurang lebih sebesar 2,268%. Dan akhirnya dari

kegiatan non operasional di sini terlihat adanya *surplus* defisit kegiatan, mohon maaf, terjadi ini apa betul ini ada perubahan dari tahun 2021 sebesar 1,589 miliar menjadi Rp7,475 miliar atau kenaikan sebesar Rp5,886 miliar atau sebesar 370%. Dan kesimpulannya defisit laporan operasional yang semula Rp2,110 triliun menjadi defisitnya menjadi Rp2,068 triliun yang artinya adanya penurunan defisit sebesar kurang lebih Rp41,9 miliar atau sebesar 1,988%.

Nah, ini kita lewati sudah dibaca, ini sudah kegiatan *slide* berikutnya bagaimana..

KETUA RAPAT:

Saya interupsi sebentar, Bu. Ini kan penurunan serapan ini coba disampaikan saya baca-baca tidak ketemu di sini. Coba diserap apa ininya

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA RI (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Oh, iya.

KETUA RAPAT:

Persoalannya apa, Bu?

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA RI (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Begini, iya...iya...iya. Ini kami tulis di halaman 4, di situ penurunannya akibat pinjaman luar negeri, Pak, kegiatan pinjaman luar negeri yang berkepanjangan terkendala prosesnya sehingga dana yang sudah tersedia tidak bisa diserap. Jadi serapan awal di tahun 2021 itu 84,84% serapannya semakin turun di 2022 menjadi 84,33%. Jadi karena pinjaman...

KETUA RAPAT:

Iya karena pinjaman *nggak* bisa cair ya?

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA RI (Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):

Prosesnya belum.

KETUA RAPAT:

Belum selesai?

**KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA RI
(Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):**

Iya prosesnya panjang, jadi karena itu. Terima kasih, Bapak.

Kemudian kita ke laporan perubahan ekuitas. Jadi ekuitas awal di kolom 1 mohon maaf ekuitas awal ya benar di kolom 1 pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp6,978 triliun diperoleh dari ekuitas akhir pada tahun 2021 itu tertera di kolom 3 ya di kolom 3 ya betul baik. *Nah*, kemudian juga defisit laporan operasional diperoleh dari laporan operasional tahun 2022 sebesar Rp2,068 miliar. Kemudian terjadi juga koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp46,457 miliar terdiri dari koreksi nilai persediaan, koreksi reklasifikasi aset, dan koreksi nilai aset non revaluasi. Dan transaksi antar entitas sebesar Rp2,246 triliun terdiri dari selisih realisasi pendapatan dan belanja, transfer keluar aset ke TNI AU, dan pengesahan hibah dalam dan luar negeri sehingga akhirnya perubahan ekuitas ini dari tahun 2021 yang waktu itu 6,978 triliun meningkat bertambah di tahun 2022 menjadi Rp7,109 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp131,457 miliar atau kurang lebih 1,884%, demikian.

Kemudian, langsung aja ya, langsung mohon izin ini di *slide* berikutnya *slide* 11. Kami sampaikan pula laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. *Alhamdulillah* berkat bimbingan, arahan, masukan dari Bapak-Ibu Ketua dan Anggota Komisi V yang sangat kami hormati, BMKG sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 dapat mempertahankan wajar atau opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Terima kasih sekali atas bimbingan dan arahan Bapak-Ibu Ketua dan Anggota Komisi V.

Berikutnya, izinkan kami melanjutkan untuk bagian kedua yaitu rencana kerja pemerintah Tahun Anggaran 2024. Tema dan arah kebijakan RKP tahun 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan BMKG mendukung dalam prioritas nasional nomor 6. Untuk prioritas nasional nomor 6 ini, BMKG mendukung prioritas pembangunan PP 1, prioritas yang pertama untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dan prioritas yang ke-2 yaitu atau PP yang ke-2 peningkatan ketahanan bencana dan iklim. Dan untuk *major project*, BMKG di sini mendukung penguatan sistem peringatan dini bencana terutama bencana hidrometeorologi serta sebagian dari bencana tektonik.

Kemudian beberapa sasaran utama bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam rancangan awal RKP 2024 yaitu yang pertama meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dengan indikator kecepatan, penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat untuk terwujud tiga menit. Kemudian meningkatnya sistem dan respon peringatan dini yang didukung oleh upaya kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam penanganan bencana. Targetnya adalah 100%.

Dan yang ketiga, meningkatnya akurasi informasi meteorologi dan klimatologi yaitu indikator akurasi informasi meteorologi targetnya 91%, kemudian akurasi informasi klimatologi targetnya adalah 83%.

Selanjutnya, untuk menurunkan atau mewujudkan tema rencana kerja pemerintah tersebut, kebijakan BMKG tahun 2024, maaf tahun 2020 hingga 2024 adalah mewujudkan BMKG berkelas dunia dengan spirit *socio entrepreneur*. Isu strategisnya meliputi kebutuhan SDM berkualitas dan berdaya saing, kemudian organisasi yang efisien dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian perlunya pemenuhan layanan MKG yang cepat, tepat, akurat, dan juga penguatan dan pengembangan infrastruktur peralatan operasional BMKG, serta kebutuhan data yang terintegrasi.

Arah kebijakan ini apa sebagai faktor kunci arah kebijakan yang menjadi faktor kunci keberhasilan Renstra tersebut meliputi lima hal tadi, keberlanjutan dan kemenangan observasi dan manajemen kualitas data, penguatan dan pengembangan sarana prasarana, kualitas dan keberlanjutan layanan prima, efektivitas dan efisiensi organisasi dan pengembangan sumber daya insani serta inovasi teknologi. *Nah*, ini mohon izin kami beri warna karena kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024, kami laporkan mengikuti warna ini yang menunjukkan kegayutan kegiatan tersebut dengan faktor kunci keberhasilan ini. Jadi nanti akan kami sampaikan selanjutnya.

Nah, untuk pagu anggaran BMKG, ini *slide* 21, Tahun Anggaran 2024 di sini total sebesar pagu anggaran 2024 sebesar 2,769 triliun yang terdiri dari dukungan manajemen adalah 1,230 triliun dan meteorologi klimatologi atau program meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebesar 1,539 triliun. Dan sumber dananya berasal dari rupiah murni di sini juga PNBPN dan pinjaman luar negeri *nah*, terutama untuk program meteorologi, klimatologi, dan geofisika total ini dari rupiah murni 1,1 triliun, PNBPN 72,8 miliar, dan pinjaman luar negeri 363 miliar.

Sementara itu, untuk dukungan manajemen rupiah murni Rp1,208 miliar dan PNBPN Rp21,7 miliar. Kemudian pagu anggaran BMKG Tahun Anggaran 2024 ini termasuk biaya operasional pegawai komponen 001 yaitu sebesar 778,656 miliar, kemudian juga belanja operasional barang yaitu sebesar Rp242,085 miliar, dan belanja dukungan operasional tugas dan fungsi unit sebesar Rp643,95 miliar. *Nah*, komposisi jenis belanja pagu anggaran 45,20% merupakan belanja barang terutama ini untuk pemeliharaan karena bertambahnya peralatan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan juga yang kedua adalah belanja pegawai sebesar 28,11% dan belanja modal sebesar 26,69%.

Kemudian belanja dukungan operasional tugas dan fungsi unit untuk komponen 005, Tahun Anggaran 2024 untuk program meteorologi, klimatologi, dan geofisika total sebesar Rp643,950 miliar dengan pembagian di pusat sebesar Rp411,074 miliar, di daerah sebesar Rp232,876 miliar. Rinciannya tertera pada *slide* nomor 23, di sini terlihat angka yang terbesar adalah

pengelolaan instrumentasi kalibrasi dan rekayasa BMKG yang mencapai Rp232,567 miliar dan ini cukup berimbang alokasinya untuk pusat dan daerah. Yang terbesar kedua adalah untuk pengelolaan jaringan komunikasi ini semuanya di pusat adalah sebesar 143,026 miliar, dan yang terbesar yang ketiga adalah untuk pengelolaan gempa bumi dan tsunami BMKG sebesar Rp80,500 miliar.

Kemudian perbandingan pagu Renstra 2024 terhadap pagu anggaran BMKG 2024. Untuk dukungan manajemen pagu Renstra 2024 adalah Rp1,304 triliun dan pagu anggaran 2024 sebesar Rp1,230 triliun, terjadi *backlog* sebesar Rp73,538 miliar. Untuk program meteorologi, klimatologi, dan geofisika Renstra pagu, mohon maaf, pagu Renstra 2024 sebesar Rp2,465 triliun, pagu anggarannya 2024 adalah Rp1,539 triliun artinya terdapat *backlog* sebesar hampir 1 triliun yaitu Rp926 miliar. *Nah*, jadi total untuk pagu Renstra 2024 baik dukungan manajemen dan program MKG sebesar Rp3,769 triliun. Total sementara itu total pagu anggaran sebesar Rp2,769 triliun atau *backlog* sebesar hampir 1 triliun yaitu Rp999,912 miliar.

Di sini kita lihat *slide*-nya bagaimana *backlog*-nya ini terlihat di tahun 2024 nampaknya *backlog* yang terbesar. Dan *slide* berikutnya sasaran strategis dan target kinerja Renstra. Ini kita lihat di tahun 2024 untuk akurasi informasi adalah 93%, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi MKG targetnya 3,85 ini target kita naikkan dari tahun sebelumnya, kemudian juga persentase pemahaman masyarakat terhadap informasi BMKG targetnya 100%, dan nilai atau terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dari nilai Kemenpan RB atas RB BMKG targetnya 93%.

Slide berikutnya, sasaran program dan target kinerja tahun 2024. Mohon izin ini di sini kita lihat *kok* targetnya 2024 *nggak* ada, kepotong ya. Ini mohon maaf terpotong ini mohon maaf sekali *kok* tidak tercetak, *nggak* ada. Coba saya lihat dari, mohon izin, tidak tercetak, di sini ada *nggak*? *Oh*, sebentar. Mohon izin, kami lewat lebih dahulu agar disiapkan ini karena terpotong, mohon maaf untuk tahun 2024.

Kemudian, mohon izin, kami melompat lebih dahulu di-*highlight* program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024. Ini kita lihat warna ini menunjukkan tadi apa faktor kunci ada 5 faktor kunci yang tertera di depan tadi, sebentar, ini sebagai faktor kunci keberhasilan Renstra ada keberlanjutan dan pengembangan observasi dan manajemen kualitas data, itu yang biru, *nah*, di sini di Kedeputan Meteorologi. Kemudian juga ada penguatan pengembangan sarana prasarana ini hijau dan seterusnya, kuning kualitas dan keberlanjutan layanan prima serta efektivitas dan efisiensi organisasi dan pengembangan sumber daya insani serta inovasi teknologi. Jadi ini *highlight*-nya misalnya untuk Kedeputan Meteorologi yaitu pembangunan apa *windshear detection* atau geser angin, deteksi geser angin yang membuat apa yang menginformasikan potensi terjadinya apa pesawat bisa membelok seketika, ini ada kita alokasikan di Kedeputan Meteorologi dan sekolah lapang cuaca nelayan sebanyak 3.800 orang di 38 lokasi ini *highlight* nya.

Kemudian untuk Kedeputan Klimatologi *highlight*-nya adalah sekolah lapang iklim untuk 3.000 orang di 70 lokasi serta literasi iklim untuk 13 lokasi. Kemudian Kedeputan Geofisika *highlight*-nya adalah sekolah lapang geofisika untuk 6.340 orang di 22 lokasi serta pengembangan sistem *earthquake early warning* atau sistem peringatan dini gempa bumi yang sampai hari ini kita belum bisa melakukan. Ini ditargetkan di 4 lokasi di tahun 2024.

Kemudian untuk Kedeputan Inskalrekjarkom *highlight*-nya di sini pembangunan atau ya pembangunan sistem proteksi petir terpadu di 10 lokasi serta laboratorium kalibrasi di 5 lokasi dan pemeliharaan, beberapa pemeliharaan ini banyak dilakukan. *Nah*, kemudian untuk sekretaris utama ini adalah *highlight*-nya antara lain pengujian dan analisis sistem operasional penyelenggaraan MKG di 2 lokasi serta penyelenggaraan layanan non audit di 195 lokasi.

Kemudian untuk rincian prioritas nasional, ini mohon izin kami sampaikan di *slide* ini tapi mohon berkenan tidak kami baca semua. Di sini prioritas nasionalnya ini terutama sekolah lapang, sekolah lapang baik gempa bumi, iklim, ataupun untuk cuaca untuk ribuan orang di puluhan lokasi. Kemudian juga untuk pemeliharaan di 1.723 unit dan juga untuk pembangunan alat pendeteksi geser angin dan layanan informasi kerentanan seismik di kota besar, ini kita tingkatkan juga. Dan beberapa sekolah lapang cuaca nelayan untuk 2.300 orang ini di Wilayah Indonesia Barat dan sekolah lapang cuaca nelayan untuk 1.000 orang di Wilayah Tengah Indonesia Bagian Tengah dan untuk 500 orang di Wilayah Timur.

Mohon izin, kami lanjutkan untuk rencana program dan kegiatan pelaksanaan sekolah lapang. Ini kami sampaikan di halaman 32. Sekolah lapang iklim periode, jadi ini kami ingin menunjukkan upaya kami untuk terus meningkatkan jumlah anggaran ataupun jumlah peserta di sekolah lapang baik iklim, cuaca, dan gempa bumi tsunami. Namun, ada sedikit penurunan dari tahun 2023 ke 2024 karena penurunan pagu anggaran tadi dari jumlah peserta 3.200 orang menjadi 3.000 orang dan anggarannya juga sedikit penurunan. Ini dari berapa sebesar Rp5,991 miliar menjadi....

KETUA RAPAT:

Mungkin ini dilewati saja kali, Bu, ya.

**KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA RI
(Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):**

Oke, baik, *nggih*.

Jadi mungkin langsung saja kami ke penutup, mohon izin.

BMKG *alhamdulillah* berkat dukungan, arahan, bimbingan Komisi V DPR RI meraih penilaian WTP 8 tahun berturut-turut sejak tahun 2015. Kemudian realisasi penerimaan PNPB dalam kurun waktu sampai tahun 2022

mengalami kenaikan disebabkan penerimaan PNBPN BMKG dari jasa navigasi penerbangan. Kemudian terjadi penurunan defisit dari Rp2,110 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp2,068 triliun di tahun 2022 akibat kenaikan penerimaan PNBPN dari sektor penerbangan.

Realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp2,398 triliun atau 84% dari pagu sebesar Rp2,843 triliun. Usulan RKA BMKG tahun 2024 berdasarkan Renstra BMKG tahun 2020-2024 sebesar 3,769 triliun dan terjadi *backlog* kalau disandingkan apa realitanya sebesar Rp999,91 miliar karena ada penurunan apa yang kita dapatkan di pagu anggaran sebesar Rp2,769 triliun.

Untuk selanjutnya, kami mohon dukungan yang terhormat Bapak Ketua, Pimpinan, dan para Anggota Komisi V DPR RI untuk pemenuhan *backlog* anggaran Tahun Anggaran 2024 ini, agar BMKG dapat mewujudkan program pembangunan tahun anggaran tahun 2024 secara optimal.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Mohon arahan lanjut, mohon maaf apabila ada kekurangan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Mungkin nanti Ibu di rapat berikutnya, tolong disampaikan ke kami nanti terkait dengan anggaran yang akan dialokasikan ya nanti dengan masing-masing Deputi nanti minta tolong, saya sudah lingkari tadi disini. Contoh pengelolaan jaringan komunikasi, kemudian pengelolaan instrumen kalibrasi dan seterusnya, nanti tolong diperjelas ya, Pak, ya. Ini biasanya kami teman-teman agak kurang detail di sini ya supaya nanti kita tahu ini BMKG anggaran sekian ini apa saja kegiatan yang dilakukan selama dari satu tahun anggaran.

Baik.

Nanti kita dengan masing-masing Deputi akan kita dalam.

Saya persilakan selanjutnya, terima kasih Ibu Kepala BMKG atas paparannya ya. Selanjutnya dari Basarnas ya singkat saja, Pak.

**Plt. KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN RI /
BADAN SAR NASIONAL RI (Dr. ABDUL HARIS ACHADI, S.H., DESS):**

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Shalom,
Om swastiastu,
Nama buddhaya,
Salam kebajikan.

**Yang terhormat Ketua Komisi V DPR RI selaku Pimpinan Rapat,
Yang saya hormati para Wakil Ketua, para Anggota Komisi V DPR RI,
Yang saya hormati Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,
serta
Hadirin yang berbahagia,**

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan ridho-Nya, kita dapat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI dalam rangka Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024 dalam Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 111/TPA Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2023. Presiden Republik Indonesia telah menunjuk Sestama Basarnas sebagai Plt Kepala Basarnas sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif Kepala Basarnas. Selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan laporan keuangan Basarnas Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran tahun 2021 dan 2022. Terlihat dalam *slide* realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan 31 Desember 2022 adalah berupa pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp12,27 miliar;
2. Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 1,67 triliun atau 95,55% dari alokasi anggaran sebesar Rp1,75 triliun. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,41%. Rincian realisasi per belanja dapat dijelaskan dengan rincian sebagaimana terlihat dalam *slide* yaitu:
 - (1) Realisasi belanja pegawai sebesar Rp476,5 miliar atau 94,01%;
 - (2) Realisasi belanja barang yaitu sebesar 859,7 miliar atau sebesar 94,95%;
 - (3) Realisasi belanja modal sebesar Rp341,8 miliar atau 99,41%;
 - (4) Realisasi anggaran tahun 2022 lebih kecil nilainya dibandingkan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 96,44%. Hal ini disebabkan sisa anggaran tunjangan kinerja ke-13, 14, dan lembur yang tidak terbayarkan pada belanja pegawai. Adapun rincian realisasi anggaran Basarnas adalah sebagaimana terlihat dalam *slide*.

Berikutnya terkait dengan laporan neraca. Laporan neraca menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitas di Basarnas. Pada Tahun Anggaran 2022 Basarnas memiliki rincian sebagai berikut:

- (1) Aset lancar yaitu sebesar 119,64 miliar yaitu terdiri dari belanja dibayar dimuka, piutang bukan pajak, dan persediaan;
- (2) Aset tetap yaitu sebesar 5,04 triliun yang terdiri dari tanah kantor pusat, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi

dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pekerjaan dan akumulasi penyusutan. Berikutnya adalah aset lainnya yaitu sebesar Rp124,81 miliar yang terdiri dari aset tak berwujud, aset lain-lain, dan akumulasi penyusutan dan amortisasi. Berikutnya adalah kewajiban jangka pendek yaitu sebesar Rp4,42 miliar terdiri dari tunggakan operasi SAR serta tunggakan listrik, telepon, dan air; yang akhir terjadi penurunan ekuitas yaitu sebesar Rp444,45 miliar dari 5,72 triliun pada Tahun Anggaran 2021 menjadi 5,28 triliun pada Tahun Anggaran 2022.

Berikutnya saya akan sampaikan terkait dengan laporan operasional. Laporan operasional menyajikan informasi tentang kegiatan operasional Basarnas dalam satu periode. Laporan operasional Basarnas sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan negara bukan pajak yaitu sebesar Rp3,54 miliar terdiri dari pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan serta pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah;
- 2) Beban kegiatan operasional Basarnas yaitu sebesar 2,11 triliun yang terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban pemeliharaan barang dan jasa, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, serta beban perjalanan dinas, dan beban penyusutan;
- 3) Kegiatan non operasional yaitu sebesar Rp3,41 miliar terdiri dari defisit pelepasan aset non lancar serta *surplus* dari kegiatan non operasional lainnya;
- 4) Terjadi penurunan defisit dari Rp2,03 triliun pada Tahun Anggaran 2021 menjadi Rp2,1 triliun pada Tahun Anggaran 2022 antara lain akibat dari kenaikan penerimaan PNBPN.

Berikutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas Basarnas periode 31 Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Ekuitas awal 1 Januari 2022 sebesar Rp5,72 triliun diperoleh dari ekuitas akhir pada tahun 2021;
- 2) Defisit laporan operasional diperoleh dari laporan operasional Tahun 2022 sebesar Rp2,1 triliun;
- 3) Koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp3,5 miliar terdiri dari koreksi nilai persediaan, koreksi reklasifikasi aset, dan koreksi nilai aset non revaluasi.
- 4) Transaksi antar entitas sebesar Rp1,66 triliun yang terdiri dari selisih realisasi pendapatan dan belanja, transfer keluar masuk antara satuan kerja, dan hibah tanah dan gedung dari Pemda atau pemerintah provinsi setempat.

Slide berikutnya berdasarkan Surat Anggota: Satu, Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 23 Mei 2023, hal: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian Pertolongan Tahun 2022 bahwa BPK telah memeriksa laporan keuangan Basarnas yang terdiri dari neraca laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan dan anggaran tahun 2022 dengan memuat

Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini pun menjadikan Basarnas berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 12 kali berturut-turut dari tahun 2011 hingga tahun 2022.

Pada bagian berikutnya, kami akan sampaikan penjelasan tentang RKA K/L Basarnas Tahun Anggaran 2024 dalam Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024. Pelaksanaan rencana kerja pemerintah tahun 2024 bertema: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, memiliki pedoman delapan arah kebijakan seperti yang terlihat dalam *slide*. Selanjutnya, Basarnas menyusun rencana kerja untuk mendukung RKP Tahun Anggaran 2024 terutama terkait dengan prioritas nasional yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, serta program prioritas berupa infrastruktur pelayanan dasar, serta kegiatan prioritas keselamatan dan keamanan transportasi.

Selanjutnya, Basarnas menyelenggarakan kegiatan proyek prioritas nasional yaitu yang pertama adalah pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi dan SAR, dan yang kedua adalah pembinaan dan pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi pencarian dan pertolongan.

Selanjutnya, dalam RKP Tahun Anggaran 2024, Basarnas ditargetkan melaksanakan kegiatan prioritas nasional berupa penyediaan sarana SAR udara, sarana laut, SAR laut, SAR darat, peralatan SAR, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan operasi SAR, pengadaan pemeliharaan sistem komunikasi SAR, dan lain-lain sebagaimana terlihat di dalam *slide*.

Dalam surat bersama pagu anggaran, Basarnas mengalokasikan anggaran untuk prioritas nasional sebesar 1 triliun. Perbandingan rincian target kegiatan prioritas nasional Basarnas sesuai surat bersama pagu anggaran dengan usulan pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlihat di dalam *slide*. Selanjutnya, Basarnas telah menindaklanjuti arahan Presiden pada saat membuka Rapat Kerja Basarnas pada bulan Februari dalam rangka ulang tahun Basarnas dengan mengajukan permohonan tambahan anggaran untuk pengadaan peralatan SAR berteknologi mutakhir antara lain SAR *drone*, *long range radar SAR*, *remotely operated vehicle*, dan *handheld* sonar. Selanjutnya,

Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Komisi V yang saya hormati,

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas tanggal 31 Juli 2023, pagu anggaran Basarnas Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2,08 triliun dengan rincian sebagaimana terlihat di dalam *slide*. Dalam Surat Bersama Pagu Indikatif 2024 telah dicantumkan juga rupiah murni pendamping sebesar Rp127,5 miliar. Basarnas telah mengirimkan surat tertanggal 17 April 2023 terkait dengan usulan perubahan penarikan pinjaman dan hibah beserta RMP Tahun Anggaran 2024, dan PJM tahun 2028 hingga 2028, 2025 maaf 2025 hingga

2028. Dalam surat diusulkan perubahan RMP yang semula 127 miliar menjadi Rp120,5 miliar.

Selanjutnya adalah pagu *trilateral meeting* pagu indikatif Tahun Anggaran 2024. Basarnas mengusulkan perubahan kembali RMP menjadi RM, hal ini karena daftar kegiatan dari Bappenas hingga saat ini belum diterbitkan oleh Bappenas untuk Basarnas dalam rangka untuk melengkapi *readiness criteria*. Dan apabila RMP tetap dialokasikan pada Tahun Anggaran 2024, dipastikan anggaran tersebut tidak dapat terserap dan harus dikembalikan ke negara.

Selanjutnya, kami akan menyampaikan terkait dengan pagu kebutuhan Basarnas Tahun Anggaran 2024 sebesar 3,6 triliun dengan rincian sebagai berikut. Program pencarian pertolongan pada kecelakaan dan bencana sebesar 2,46 triliun dan program dukungan manajemen sebesar 1,13 triliun.

Adapun pagu anggaran Basarnas pada tahun 2024 sebesar 2,08 triliun dengan rincian yaitu program pencarian pertolongan pada kecelakaan dan bencana sebesar 1,18 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp896,36 miliar sehingga terdapat *backlog* sebesar 1,51 triliun.

Pada Tahun Anggaran 2024, Basarnas merencanakan untuk program pencarian pertolongan pada kecelakaan dan bencana sebesar 1,18 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp896,36 miliar. Rincian program tersebut dibagi dalam beberapa kegiatan sebagai sebagaimana terlihat di dalam *slide*.

Adapun *slide* berikutnya, adapun beberapa isu strategis Basarnas pada Tahun Anggaran 2024 antara lain yaitu penyusunan rencana strategis Basarnas tahun 2025 hingga 2029. Tahun ini kami telah sedang menyusun yang namanya teknokratik Renstra sehingga kita harapkan dengan teknokratik Renstra pada tahun 2023 ini, tahun 2024 kami akan menyusun untuk rencana strategis tahun 2025 nya. Di samping itu, kami juga memiliki isu-isu strategis yaitu peningkatan pelaksanaan operasi SAR dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, ini pun juga arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Meskipun demikian, kami, kendalanya terbatasnya anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana Diklat, ini pun juga beberapa kali Anggota Komisi V DPR juga sempat berkunjung ke Balai Diklat. Kita memang memerlukan sarana prasarana Diklat ini.

Yang berikutnya adalah untuk pembinaan potensi pencarian pertolongan termasuk di dalamnya untuk pemberdayaan masyarakat, serta berikutnya adalah pengembangan sarana prasarana yang inovatif dalam dengan menggunakan teknologi yang lebih mutakhir.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024 dalam Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pimpinan serta seluruh Anggota Komisi V DPR RI kepada Basarnas selama ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu menganugerahkan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua.

Sekian

Shalom,
Om shanti shanti om,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Saya pesan juga ke Basarnas, Pak, seperti yang tadi saya sampaikan kepada BMKG. Tadi saya tanya dengan sekretariat bahwa jadwal kita untuk pendalaman lebih lanjut itu waktunya terbatas. Oleh karenanya, sebagai fungsi kontrol, kami kalau hanya sebatas ini kan lemah kami mengontrol anggaran, Pak. Nanti tolong masing-masing kegiatan ini disampaikan ke kami, Pak, ya terutama yang pokok-pokok ya, kalau rutin nggak perlu, Pak. Kalau yang rutin itu kan sudah... sudah... apa namanya itu kan sudah ya seperti itulah ya. Untuk bentuk kegiatan belanja modal, belanja barang, dan seterusnya tolong disampaikan kepada kami supaya kami bisa melihat seberapa *urgent* penggunaan anggaran itu digunakan untuk hal-hal tersebut dan teman-teman juga bisa memahami. Kemudian alokasinya untuk apa saja *gitu loh* sebagai bentuk pengawasan dalam konteks kemitraan kita membahas anggaran ini.

Saya rasa itu saja. Saya persilakan untuk pendalaman di meja Pimpinan ya ini sebetulnya sudah kita berulang-ulang kita sampaikan di rapat-rapat terdahulu, ini hanya ujung dari proses pembahasan setelah pendahuluan pembahasan anggaran dulu sudah kita bicarakan di waktu-waktu yang telah lalu.

Kemudian yang terakhir Pimpinan juga berpesan ya soal transparansi dan akuntabilitas ya. Ini Komisi V ini sudah beberapa kali diterpa gelombang panas dan saya berharap ini pelajaran berharga bagi kita semua supaya transparansi dan akuntabilitas ini merupakan bagian yang juga harus menjadi hal yang utama di kita dalam melakukan pembahasan supaya hal-hal yang tidak diinginkan tuh jangan sampai terjadi.

Saya persilakan sesuai yang mendaftar ya Ibu Cen, bersiap-siap, Pak Tamanuri, dilanjutkan nanti dengan Pak Eddy Santana. Saya persilakan, nanti kalau sudah selesai langsung saja kalau Bu Cen sudah selesai, Pak Tamanuri silakan lanjut, lanjut Pak Eddy Santana karena ini Pimpinan tidak ada yang mendampingi, saya izin sebentar meninggalkan tempat.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan

**Yang saya hormati Pimpinan, teman-teman Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak...Bu Kepala dari BMKG, juga
Plt. Basarnas,**

Saya langsung saja mungkin ke BMKG.

Pertama, saya mengucapkan terima kasih Bu Kepala, radar saya masuk ya di 2024. Terima kasih sekali.

Yang kedua, saya ingin menanyakan prioritas nasional Ibu yang mengenai penguatan sistem peringatan dini bencana termasuk bencana lingkungan. Jadi mungkin kita sebagai BMKG bukan hanya masuk sebagai penguatan sistem saja, harus masuk ke dalam, ikut bagaimana agar bencana-bencana ini bisa kita tanggulangi contohnya polusi udara saat ini. Polusi udara di DKI ini sangat sudah... bukan DKI ya dan sekitarnya sudah sangat luar biasa. Bagaimana kita, BMKG harus ikut serta menjadi bagian untuk menganggulangnya. Jadi mungkin minta penjelasan juga ke Bu Kepala apa-apa yang sudah dilakukan dan apa tindakan yang ini saat ini banyak masyarakat juga *nggak* berani keluar rumah dan bahkan dari pemerintah juga sudah mengusulkan WHF ya *Work From Home* jadi WFH maaf. Jadi mungkin itu dari saya.

Kalau dari untuk Basarnas mungkin saya ingin menanyakan mungkin penyerapan ya apakah sudah sesuai. Dan satu lagi 2024, kita harapkan apa yang sudah diprogramkan dapat berjalan dengan lancar.

Mungkin itu saja dari saya.

Terima kasih.

F-P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati rekan-rekan Anggota Dewan,
Yang terhormat Ibu Kepala BMKG,
Saudara Pejabat atau Pelaksana Harian Basarnas,
Hadirin berbahagia,**

Pertama-tama, kami mengucapkan bangga atas keberhasilan Ibu dapat mengantar lembaganya dapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian, ini bukan hal yang gampang, demikian juga ke Basarnas. Selanjutnya, saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Ibu tadi laporan bahwa dari tahun 2021, 2022, nanti masuk ke 2024 usulan, ini mendengarkan satu kondisi yang setiap tahun itu

pengguna anggaran itu menurun, menurun, menurun, menurun, menurun dari 2021 2,4, 2022 jadi 2,3 kemudian nanti 2024 akan naik kembali.

Nah, dari itu saya harapkan dari gambaran yang kita lihat ini kenapa kita itu berupaya untuk mengusulkan pas-pasan jangan selalu ada sisa ada sisa-sisa terus sehingga yang seyogyanya dana yang masuk di Ibu itu harus lembaga saya yang menggunakan, akhirnya karena Ibu sedang ngeplot duluan sehingga dana itu tidak bisa saya gunakan, terutama yang namanya transfer daerah-transfer daerah, itu kan daerah-daerah itu dananya minim sekali yang ditransfer karena sudah kita blok dari lembaga-lembaga yang ada di pusat ini.

Nah, oleh karena itu, harapan saya adalah betul-betul dalam perencanaan ini perinciannya betul-betul pas jangan terlalu banyak, ini Ibu bisa sampai hampir 1 triliun setiap tahunnya berbeda. Kemudian saya dukung juga ini untuk tahun 2024, ada kenaikan ini yaitu yang menjadi fokus kita adalah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ya, tentu sumber daya manusia ini tidak hanya di lingkungan Ibu saja yang di lingkungan luar Ibu ya tim sekolah-sekolah lapangan segala macam segala macam itu adalah merupakan sumber daya manusia. Saya berterima kasih kepada Ibu yang sudah memplot kami-kami yang ada di daerah itu sekian banyak sehingga tadi itu sampai 2.300, saya saja kebagian lebih kurang 100, *nah* ini sangat membantu. Selain membantu menambah wawasan pengetahuan mereka terhadap apa itu masalah meteor, masalah nelayan, ini juga membantu mereka di bidang ekonomi yang seyogyanya mereka tidak ada kerjaan apa-apa, dengan pendidikan selama dua hari mereka dapat duit 200 lebih dengan makan segala macam, *nah* ini adalah membantu, karena apa? kondisi ekonomi kita di masyarakat itu sangat-sangat memprihatinkan.

Nah, oleh karena itu, saya sangat mendukung ini, ditambah lagi inovasi teknologi. Ini memang harus Bu, jadi kita harus sekarang ini saya nilai di lembaga Ibu luar biasa, jadi sudah hampir paripurna walaupun kemarin itu masih ada selisih sedikit. Ibu menyampaikan di televisi hari Senin, malam Senin apa malam Senin apa malam Selasa, malam Selasa hujannya tapi malam Senin sudah hujan. *Nah*, ini saya bilang kelebihan kecepatan ini hujannya ini. Ibu sudah memprediksi malam Selasa, *nah*, cuma *gapapa* itu sudah mendekat itu satu hal yang sangat-sangat baik. *Nah*, mudah-mudahan yang akan datang lebih ditambah lagi *entah* itu ada inovasi teknologi ini akan lebih baik lagi. Saya ngikutin terus, Bu, saya ngikutin terus. Ya, harapan kita adalah supaya Ibu juga nanti penggantian terus jadi Kepala BMKG.

Kemudian Pak Basarnas. Bapak juga ada penurunan-penurunan terus setiap tahunnya dari tahun 2021 turun, 2022 turun, kemudian tahun 2023, 2024 turun. *Nah*, ini harapan saya adalah supaya standar fasilitas yang ada di daerah-daerah itu harus disamakan. Kalau satu daerah punya helikopter, punya helikopter semua, kalau satu daerah punya traktor punya traktor semua. Kemudian yang di pusatnya ini, Pak, yang kami pernah kunjungi ini ya diusulkan lah kalau namanya kolam renang itu kurang 100 meter ditambah kenapa *sih nggak* ditambah-tambah, karena apa? karena pendidikan Bapak itu bukan hanya, lebih banyak apa raganya yang di yang harus keluar, Pak,

soalnya Bapak itu di lapangan. Kalau raganya yang satu kena *bengek* yang satu kena, gimana Bapak mau kerja. Berenang *nggak* bisa, segala macam *nggak* bisa, sedangkan dia kadang-kadang naik tebing, kadang-kadang turun ke laut.

Nah, oleh karena itu, ini fasilitas harus di pusat ini, jangan kayak yang dulu itu kita lihat *nggak* tahu sudah ada perubahan atau *nggak* itu tapi saya belum lihat itu di usulan Bapak untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada. *Nah*, oleh karena itu, harapan saya adalah di tahun 2024 kalau ada nanti bisa masih bisa di kita rubah-rubah supaya ini diprioritaskan.

Nah, kemudian lagi yang saya katakan tadi itu, fasilitas yang ada di daerah juga harus sama standarnya. Jangan ada beda yang jauh di situ jauh di sini ya kan jangan, karena Bapak *nggak* tahu seperti andai kata daerah saya di Lampung itu saja. Kalau ada kejadian di yang di... di Gunung Krakatau, kan dia hanya perlukan satu gerakan cepat. Memerlukan satu gerakan cepat *nggak* bisa kita minjam kapal feri, *nggak* bisa, kita harus punya kapal sendiri, kita punya harus punya heli sendiri. Ya, mungkin saya enak di Lampung karena dekat dari pusat Jakarta, tapi kawan-kawan kita yang di belahan timur situ di bagian tengah situ, dari mana dia harus cepat-cepat bisa ada bantuan dari pusat kalau dia tidak punya otonom apa itu fasilitas yang ada sama dia.

Saya rasa demikian, Pak.
Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Pak Eddy Santana, silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan yang saya hormati beserta seluruh Anggota,
Kepala BMKG, Kepala Basarnas beserta seluruh jajaran,**

Saya sebetulnya mirip-mirip dengan Pak Tamanuri tapi ya saya pertegas saja lagi Ibu ya BMKG. Ibu tadi memaparkan bahwa dari dulu juga selalu gitu. *Backlog* tadi 959 miliar, 1 triliun lah, padahal realisasi Ibu itu ya BMKG ini dibandingkan rencana gitu walaupun katanya *backlog* masih lebih banyak, masih sisa. Tahun 2021 440 miliar Bu, 2022 445,6 miliar. *Nah*, makanya anggaran BMKG cenderung turun-turun-turun begini. Waktu pembahasan dengan Bappenas dan segala macam itu dari 2,9 2,8 sekarang 2,7 itu 2,7 untuk 2023 ya atau 2024.

Nah, ini Bu jadi *backlog*-nya ini di mana *gitu* ya. Sedangkan sudah dikasih ternyata tidak seindah realisasinya *gitu*. *Nah*, ini saya pikir coba Ibu evaluasi lagi gimana *gitu*, di mana macetnya *gitu*, di mana sisa anggaran itu bisa berlebih di mana yang banyak. Itu sudah bagus perencanaannya persentasi-persentasinya bagus. Ada belanja pegawai dari 27% ya perencanaan, belanja barang modal di 78% hampir seperti itu sudah sudah bagus ya tapi masih juga lebih di belanja barang belanja modal. *Nah*, ini saya kira ini harus kita ini harus kita evaluasi di mana apakah rencana misalnya pembelian tidak bisa direalisasikan. Dulu pernah kan karena ada permasalahan barang luar yang dimana waktu itu ya *nah* itu. *Nah*, sekarang apa masalahnya itu *gitu*. *Nah*, ini mohon penjelasan juga nanti, *nggak* usah langsung, Bu, tertulis silakan saja.

Kalau Basarnas saya kira di atas 90% sudah bagus, tapi masih ada sisa dikit. *Nah*, Bapak minta *backlog* juga ada sekian kurang *gitu*, *nah* sebelum minta yang kurang tapi masih ada sisa *gitu*. *Nah*, ini yang saya pikir ini kontradiktif dengan ini rencana realisasi dan *backlog*.

Nah, ini saja dari saya, Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik.

Masih ada dari Anggota? cukup ya.

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Karena dari meja Anggota sudah cukup dan tadi saya sampaikan itu saja, Bu, nanti tolong disampaikan ke kami yang program prioritas di luar rutin ya. Kalau sekolah lapangan kan tadi udah disampaikan di sini Anggota pasti sudah bisa lihat baik Basarnas maupun BMKG ya.

Kemudian hanya mungkin yang kegiatan-kegiatan utama ya di Basarnas maupun BMKG yang perlu mungkin nanti disampaikan kepada kami dalam konteks pengawasan supaya kami bisa tahu ini mitra apa saja yang dilakukan sehingga kami bisa juga melihat sebaran kegiatannya di mana saja sehingga teman-teman yang mungkin kebetulan berada di wilayah di mana ada kegiatan BMKG juga waktu reses dan seterusnya bisa melihat *gitu loh*.

Kemudian dari sisi urgensi juga perlu disampaikan sehingga kita tidak perlu berdebat di sini, Pak ya, urgensinya juga perlu disampaikan kepada kami

ya supaya kami memahami struktur anggaran dari BMKG dan Basarnas ini dalam APBN Tahun 2024 itu seperti apa.

Saya rasa itu saja ya. Kalau tidak ada lagi dari yang lain, saya persilakan Pak jawab singkat saja Ibu ya, Bu Kepala BMKG apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman ya, juga dari Basarnas yang singkat saja. Nanti yang sifatnya tadi detail Pak Eddy Santana tadi menyampaikan mungkin bisa dijawab secara tertulis kepada kami sehingga kami nanti melihat apakah di tenggat waktu yang masih ada masih diperlukan pendalaman atau tidak untuk BMKG maupun Basarnas terkait dengan program tahun 2024.

Saya persilakan dulu Bu Kepala BMKG.

**KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA RI
(Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):**

Terima kasih.

Bapak Ketua Komisi V DPR RI beserta Bapak-Ibu Anggota Komisi V,

Atas masukan-masukan nya dan ada beberapa hal yang perlu dijelaskan.

Yang pertama dari Ibu Cen Sui Lan terkait bagaimana peran BMKG ini dalam menghadapi polusi udara. *Nah*, jadi kami perannya di sini adalah melakukan monitoring juga memprediksi kapan kira-kira akan hujan yang ternyata kan sejak awal sudah diprediksi bahwa mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September, bahkan sampai Oktober itu kan kering sehingga sebetulnya sudah ada peringatan dini. Jadi kami memberikan peringatan dini. Kemudian membantu untuk mengatasi dengan melakukan penerapan teknologi modifikasi cuaca atau penyemaian awan untuk terjadi hujan.

Terus terang secara teori sebetulnya sangat sulit karena awannya sudah sangat kurang, sehingga tadi terlambat satu hari itu karena harusnya tidak terjadi, Pak, harusnya tidak terjadi tapi *alhamdulillah* ini masih bisa terjadi namun tidak terjadi lagi ya jadi tidak terjadi lagi. Tapi kami sifatnya siaga, Bapak, menunggu sewaktu-waktu kalau ada awan lewat ini bisa diprediksi tiga hari sebelumnya kita siap untuk menurunkan kembali. Jadi peranannya adalah untuk melakukan penyemaian awan-awan hujan.

Kemudian terima kasih atas juga apresiasi dari Ibu Cen Sui Lan terkait apa upaya radar pemasangan radar dan kami terkait prioritas nasional kami sangat setuju dan akan terus mendukung terkait dengan peringatan dini bencana lingkungan.

Kemudian yang kedua, Bapak Tamanuri, terima kasih atas apresiasi dan masukannya dan betul sekali justru *backlog*-nya terkesan semakin membesar tapi kenapa *kok* serapannya semakin rendah. Puncak rendah itu saat pandemi saat pandemi selama terutama dua tahun berturut-turut tuh hanya 84 sekian itu

terutama karena saat pandemi itu pengadaan barang belanja modal itu terhambat, Bapak. Kita membeli radar, membeli peralatan-peralatan yang impor di sana itu pabriknya tutup karena pandemi. *Nah*, itu berlangsung dua tahun sehingga yang sudah direncanakan untuk dibeli itu sama sekali tidak bisa selesai tepat waktu, Pak. Itu yang pertama.

Yang kedua, ternyata proses untuk pinjaman luar negeri, tadi karena impor. Yang kedua, karena pinjaman luar negeri itu prosesnya sangat panjang proses lelangnya itu sangat panjang dan kebetulan sejak tahap awal proses itu ada hal yang kurang harmonis, namun akhirnya bisa kami atasi *InsyAllah* serapan mohon doanya dapat kita tingkatkan dengan adanya penyempurnaan proses lelang tadi.

Dan yang terakhir beliau, Bapak Eddy Santana juga sama. Jadi kami akan terus evaluasi dan mengupayakan untuk percepatan karena Presiden pun juga sudah mengingatkan berkali-kali ini serapan harus ditingkatkan.

Demikian.

Terima kasih atas masukan-masukan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih, Bu Kepala BMKG.

Silakan, Pak Haris.

**Plt. KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN RI /
BADAN SAR NASIONAL RI (Dr. ABDUL HARIS ACHADI, S.H., DESS):**

Terima kasih, Pak Ketua.

Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas arahan tadi terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dari Ketua Komisi V DPR RI dan juga terkait dengan agar menyampaikan pokok-pokok belanja modal alokasi belanja modal yang besar-besar tadi. Berikutnya, saya ingin menyampaikan tanggapan terkait dengan pertanyaan dari Bu Cen tadi disampaikan terkait dengan penyerapan tahun anggaran ini.

Serapan sebesar 47,81% memang ini lebih rendah dari target yang seharusnya dicapai pada pertengahan bulan Juli kemarin kami juga sudah melakukan rapat evaluasi implementasi anggaran sehingga ini kita harapkan pada triwulan berikutnya akan benar-benar sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh organisasi.

Yang kedua, terkait dengan pertanyaan Pak Tamanuri. Kami sebenarnya sudah melakukan belanja modal sesuai dengan prioritas atau potensi yang terjadi di satu tempat atau satu kantor SAR sehingga pengadaan baik itu belanja modal barang itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di sana. Memang kalau kita melihat anggaran yang ada, memang Basarnas sangat kecil atau terbatas sekali sehingga kami pun memiliki strategi dalam rangka untuk itu untuk mencapai target sesuai dengan yang diharapkan. Kami melakukan kerjasama pentahelix dengan TNI, Polri, lembaga masyarakat dan lain sebagainya termasuk dengan media dan akademisi seperti itu.

Terkait dengan sarana prasarana di Balai Diklat, memang benar setelah kunjungan Anggota Komisi V DPR RI ke Balai Diklat ya baru satu ada kegiatan yang nampaknya ada perubahan. Kemarin kami membangun yang namanya gedung untuk pelatihan untuk Urban SAR, jadi SAR Kebencanaan. Memang kami terus dari tahun ke tahun ingin memiliki sarana prasarana yang memadai. Terus terang beberapa waktu yang lalu kami pun juga melakukan melatih Tim SAR dari negara lain termasuk dari Singapura kemarin sempat kami latih sehingga ini perlu dukungan dari Komisi V DPR RI dalam rangka untuk mendapatkan anggaran yang memadai dalam rangka untuk sarana prasarana yang lebih berkualitas.

Berikutnya, Pak Eddy Santana, terima kasih atas dukungannya. Tadi disampaikan terkait dengan lebih kecil dibandingkan tahun 2021, serapan tahun 2022 lebih kecil. Kami sampaikan tadi bahwa kenapa ini lebih kecil karena yang pertama adalah tunjangan kinerja 13 dan 14 itu tidak terserap. Yang tadinya kita berharap ada kenaikan tunjangan kinerja untuk SDM Basarnas tetapi pemerintah belum menyetujui. Yang pertama itu. Yang kedua adanya sisa anggaran dari beberapa kontrak sehingga kalau ini dikumpulkan cukup besar juga. Itu kenapa alasan tahun 2022 daya serapnya lebih kecil dibanding 2021.

Saya kira itu.

Terima kasih, Bapak Pimpinan, Anggota.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Izin, izin, izin, Pimpinan

KETUA RAPAT:

Iya, silakan Pak Eddy.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Jadi maksud saya bukan begitu, Pak, maksud saya begini. Dalam paparan rencana gitu untuk misalnya 2024, sama BMKG Basarnas ada *backlog* sekian *gitu*. Padahal realisasi berapa tahun ini masih di bawah rencana *gitu* artinya masih sisa walaupun kalau Basarnas sedikit *tuh*, BMKG 84% *loh* cuman

realisasi dua tahun 2021-2022. *Nah*, ngapain kita minta segitu ada *backlog*, jadi harusnya malah diturunkan ya itu. Kalau Basarnas agak ngepas lah, kalau Ibu harusnya turun Bu anggaran, iya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Nah, jadi kalau boleh saya perjelas, Pak. Ini kan kita mengajukan tinggi gitu loh tapi sarapan kitanya *enggak* nyampe *gitu loh* maksudnya. Tapi tadi kalau dari BMKG kan karena *loan* Bu ya ini ada loan ada hambatan di *loan*-nya, Pak, karena bantuan luar negerinya ini di BMKG nya bukan tidak bisa diserap ya Bu ya tapi karena memang uangnya yang prosesnya yang menghambat dari alur perencanaan yang ada atau program yang ada di BMKG. Tentu juga sama dengan Basarnas, Pak ya, kami tahu ya mudah-mudahan Pak Haris bisa memperbaiki situasi di dalam di Basarnas ya. Tolong teman-teman Basarnas yang hadir di sini Bapak-Bapak yang terhormat sekalian ya, Pak ya. Tolong kerja sama kita semua dibantu Pak Haris ini bagaimana menangani Basarnas yang kita cintai ini.

Saya sampai hari ini jujur saja, Pak, mendapat banyak pertanyaan diundang stasiun TV sana sini, saya memilih untuk tidak komen terlalu banyak ya. Kan Bapak juga bisa lihat bagaimana kita menempatkan diri. Tapi ini *tuh* tadi sempat saya sampaikan bahwa ada sisi kami juga yang harus bertanggungjawab kepada Republik ini ketika mitra kami pelaksanaan tugasnya sesuai atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat *gitu loh*. Pas ditanya DPR kemana mengawasi atau tidak dan seterusnya.

Oleh karenanya tadi, saya minta tolong, bahasa saya minta tolong, Pak, Bapak-Ibu sekalian minta tolong ya kami juga dikasih informasi-informasi ya membangun lah dalam arti kata sebagai mitra sehingga kita bisa melaksanakan Tupoksi kita masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *Nah*, terkadang kami tidak tahu kegiatannya apa, kegiatannya pun kita *nggak* ngerti, Bu. Ditanya *loh* kan mitranya Komisi V kan dia *nggak* tahu. Oleh karenanya, saya minta tadi dipertajam nya kirim ke kami. Kami silakan saja Bapak-Ibu anggarkan itu silakan *deh* kita tidak masuk sampai sejauh itu tapi kami dikasih informasi lebih awal, Pak. Jangan pada posisi kami sudah *nggak* bisa apa-apa.

Contoh, misalnya saya. Sebagai Ketua ini Bapak-Bapak sekalian, saya menandatangani itu hanya satu lembar kertas, Pak, dan satu baris kalimat. BMKG anggarannya sekian, isinya belanja modal belanja rutin belanja barang, udah itu saja. Jadi kalau saya terjadi sesuatu dan hal terus saya diperiksa, saya disuruh menguraikan yang saya teken kan tidak terurai, masalah ini. Perlu dalam konteks pengawasan kami merasa DPR ini *kok* jadi repot posisinya kalau seperti ini kalau pola pembahasannya seperti ini. Saya seolah-olah seperti tidak *ngerti* apa yang kita kerjakan kita rapat berhari-hari dan seterusnya, kenapa? karena transparansi dan akuntabilitas ini tadi tidak terbangun, itu yang saya maksud. Kalau transparansi dan akuntabilitas ini

terbangun kita bisa saling mengingatkan, Pak, satu sama lain *gitu loh*. Ini kenapa, di mana, dan seterusnya urgensinya apa. Jadi lebih mengutamakan objektivitas daripada subjektivitas terkait konteks anggaran itu sendiri.

Ini penting ini. Saya perlu sampaikan ini secara terbuka ya kepada kita semua karena saya juga kemarin, Pak, dipanggil seharian juga saya di sana. Padahal kita *nggak ngerti* apa-apa *gitu loh*. Tapi lucu juga kalau ditanya *kok* *nggak* tahu, Bapak kan Ketua, kan Bapak yang teken. Benar juga saya pikir saya tekan *kok* saya jawab tidak ngerti itu loh.

Jadi, *gitu loh* maksudnya Pak ya. Jadi bukan apa-apa *gitu* silakan Bapak-Ibu anggarkan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tadi bukan hanya kepada DPR tapi kepada bangsa dan negara ini dalam bentuk tanggung jawab kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita yang sudah diberikan oleh negara sehingga kami pun memposisikan diri dalam konteks politik anggaran itu bisa menggunakan posisi kami *gitu loh*. Karena anggaran itu Kementerian Keuangan tidak akan jalankan.

Orang saya ditanya loh, Pak, kenapa masih takut *loh* nanti DPR tidak setuju. Saya bilang *ngapain* tidak setuju, kapan saya menghambat pengesahan anggaran, kan begitu. Saya ngomong *gitu*, Pak. Cek *dong* tanya ke komisi pernah *nggak* saya hambat pengesahan anggaran sesuai ketentuan aturan yang berlaku? *ndak* pernah, bahkan yang antar anggaran itu staf, Pak, bukan Bapak-Bapak bukan Ibu-Ibu sekalian Pimpinan, stafnya Bapak kurir surat saja kita teken, tak pernah kita hambat. Tapi betapa repotnya kita ditanya seperti itu, Bu.

Oleh karenanya, kami ingin *ngerti* sekarang supaya kami bisa menjelaskan secara detail baik dalam konteks menegakkan hukum maupun kepada masyarakat luas, *gitu loh*. Kalau ditanya tidak ngerti kan aneh, saya dibilang tidak ngerti aneh Bu, “kan Bapak yang teken”, benar juga saya yang ngesahin *kok* baru boleh jalan.

Nah, ini saya buka ini Bapak-Ibu sekalian ya supaya apa, saya punya tanggung jawab moral menjaga kehormatan komisi ini *gitu loh*. Siapa Ketua nya? Pak Lasarus, *nah* kan pribadi saya Bu, langsung Komisi mitranya mana? Komisi V. Ketuanya siapa? Lasarus, integritasnya di pertaruhan di situ, nama baik saya di pertaruhan di situ, saya *nggak ngerti* apa-apa. Dibilang *nggak ngerti*: “masa *lu* *nggak ngerti* kamu ketuanya”, ya, *modar*, Pak, *nggak* bisa jawab.

Nah, ini sekarang saya *nggak* mau lagi di posisi itu, saya ingin apapun dalam konteks transparansi dan akuntabilitas keuangan negara ini kita sama-sama terbuka. Kami tahu apa yang Bapak-Ibu kerjakan dan kami juga akan mengawasi sesuai aturan main yang ada. Bapak boleh *complain* di ruang rapat ini kalau ada Anggota Komisi V melakukan pengawasan di luar kepatutan dan kepantasan, protes saja Bapak-Ibu, saya persilakan.

Kalau kami keluar dari jalur aturan dan ketentuan yang ada, protes saja silakan, itu hak Bapak dan Ibu dengan kehormatan jabatan kita masing-masing. Kita terbuka, Pak, ketimbang kita saling tidak *ngerti*, *nah* kan aneh kalau *nggak ngerti*. Karenanya saya tadi minta itu alasan tadi Bu Ketua, Bu Kepala BMKG dan Plt Kepala Basarnas itu alasan saya minta kenapa tolong kegiatan detail disampaikan kepada kami supaya waktu berjalan, penganggaran berjalan kami pun turut mengawasi, mengawasi kan luas sekali, Bu, kita mengawasi ini kan luas mulai dari proses sampai kepada pelaksanaan kegiatan itu sendiri representasi rakyat. Rakyat tahu ini digunakan duit rakyat digunakan untuk ini, uang negara digunakan untuk ini, selesai tidak kerjanya, tepat sasaran atau tidak, prosesnya mengacu kepada aturan ketentuan yang berlaku atau tidak.

INTERUPSI F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Interupsi, Pimpinan

KETUA RAPAT:

Kemudian, sebentar. Bapak-Ibu sekalian kita semua terbuka di ruangan ini *nggak* ada lagi. Kalau ada rapat-rapat tertutup *nggak* ada. Saya minta kepada Pimpinan mitra pemerintah *nggak* ada lagi rapat-rapat tertutup ya, tapi kalau di luar pengetahuan Pimpinan silakan saya tidak ikut bertanggung jawab ya. Jadi ini perlu saya sampaikan amanat ini ya, kalau saya ngomong begini *nih* pasti ada sebab lah. Saya mau tunjukkan integritas dan tanggung jawab saya sebagai Ketua Komisi.

Silakan, Bu Estu.

F-PKB (H. DEDI WAHIDI, S.Pd.):

Daftar, Ketua

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Terima kasih, Pimpinan.

Melanjutkan apa yang tadi disampaikan Pimpinan dan juga disampaikan oleh Pak Eddy Santana. Yang pertama, yang disampaikan Pak Eddy Santana tadi Ibu sampaikan bahwa serapan anggaran ini karena apa namanya tidak optimalnya serapan anggaran karena adanya dana *loan* yang tidak cair. *Nah*, yang saya ingin tahu, ini yang tidak pernah juga disampaikan kepada kita. Ini kan sudah direncanakan jauh sebelumnya, kemudian tiba-tiba *kok* bisa tidak cair. Kalau tadi alasannya pabrikannya semua tidak ada apa, iya sampai dengan tahun 2022 memang benar pabrik itu tutup sama sekali. *Nah*, mohon ini Ibu tolong dijelaskan secara jelas kepada kami sehingga kami tidak punya pikiran yang kemana-mana ini.

Dan juga, Pak Ketua, saya juga ketika banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ke luar dari yang tidak pernah kita bahas sama sekali anggarannya, tiba-

tiba di kementerian lembaga itu banyak sekali. Sama dengan Ketua, saya pun sering sekali mendapatkan pertanyaan itu sering sekali, ternyata ada yang anggaran langsung dari Bappenas atau dari manapun yang tidak pernah kita bahas sama sekali. Ini tidak pernah disampaikan kepada kita dan kita tidak tahu apa-apa.

Nah, seperti halnya di BMKG yang beberapa waktu yang lalu ada kunjungan waktu ada kegiatan WMO, ini kan tidak sedikit rombongan yang dibawa ke sana. Ini tentunya juga anggarannya cukup besar dan tidak pernah juga disampaikan ke kita. *Nah*, inilah sebenarnya kesalahan dari apa yang dimaknai ketika DPR dibidang tidak boleh membahas satuan tiga, ya ini jadinya. Ya, inilah jadinya, bukan hanya di lembaga, di kementerian pun seperti ini. Kita jadi orang *goblok* sama sekali kenapa saya jadi akhirnya tidak, jarang sekali saya berbicara, apa yang mau saya bicarakan di sini, *wong* kita *nggak* tahu apa-apa. Kalau kemudian itu tidak dibahas kita hanya dikasih lembaran buku ini kegiatan di ini tapi tidak pernah dibahas, hanya rincian kegiatan saja. Terus apa artinya buat kita kalau tidak ada pembahasan di dalam rapat komisi. Ini menurut pandangan saya, semoga saja ini benar sesama dengan teman-teman.

Dan saya kira apa yang diputuskan oleh MK itu tidak benar ketika kita tidak DPR tidak boleh membahas sampai pada satuan tiga. Terus apa yang dilakukan fungsi pengawasan oleh Anggota DPR? kita mempunyai tugas salah satunya Tupoksi kita adalah fungsi pengawasan. Apa yang mau diawasi? Tiba-tiba di daerah ada pembangunan ini itu, kita *nggak* tahu. *Loh* kan ini kan Komisi V, iya Komisi V tapi kami tidak pernah membahas itu, terus kita mau ngomong apa.

Sama seperti halnya tadi disampaikan oleh Pimpinan. Tolong saya *nggak ngerti* kita harus ngomong apalagi, apakah ini harus ke MK lagi ataukah memang sebenarnya kita yang salah memaknai dari keputusan MK. Kalau kemudian di Badan Anggaran mungkin tidak boleh membahas satuan tiga itu pantas, tapi ini adalah komisi yang memang seharusnya kita membahas sampai pada satuan tiga, itu.

Saya kira ini Pimpinan dari saya, tentunya saya sangat prihatin dengan kejadian yang menimpa di mitra Komisi V, dan kita tentunya berharap tidak hanya *stop* sampai di sini jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian di berikutnya. Itu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-PKB (H. DEDI WAHIDI, S.Pd.):

Ketua, saya, Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan Pak Dedi.

F-PKB (H. DEDI WAHIDI, S.Pd.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih, Ketua.

Makin dekat Pemilu, Ketua, makin banyak aspirasi, Ketua. Kalau di Kementerian Perhubungan, kita dikasih bus sekolah untuk anak sekolah, kalau di PUPR kita diberi Rusun, diberi MCK. *Nah*, mestinya dari Basarnas ini ada yang minta, Pak, di daerah saya, Dapil saya ada SMK Kelautan di Cirebon di Indramayu mereka datang ke saya minta perahu karet, Pak, cocok sekali kalau kita-kita dikasih perahu karet *nih*, Pak, ya. Saya kira itu usulan Ketua, ini aspirasi amanat rakyat.

Terima kasih, Ketua

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Sudah lah Pak, ngasih perahu karet ke sekolah. Perahu karet dia saja *nggak* punya Pak, ini buat beli perahu karet saja *nggak* punya dia. Sudah lah *MasyaAllah* lah pokoknya sampai dia *MasyaAllah* saja kita, Pak. Iya cukup ya

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Pak Ketua, tadi saya ada sedikit.

KETUA RAPAT:

Oh, iya, Pak Willem silakan.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Baik.

Pak Ketua, Bapak-Ibu Anggota Komisi V, dan juga Mitra dari Kepala Basarnas dan BMKG serta seluruh jajaran yang kami hormati,

Dari kami ada beberapa catatan tentunya kami mau bikin pada kesempatan ini. Pertama, kami terkait dengan hasil pemeriksaan BPK RI yang telah memperoleh penilaian WTP baik Basarnas maupun BMKG, kami tentu memberikan apresiasi. Dan juga terkait dengan realisasi anggaran yang telah dicapai baik BMKG maupun yang Basarnas. Dan ada beberapa catatan yang

ingin kami berikan di sini adalah pertama terkait dengan dana realisasi BNPP Basarnas Tahun 2022 sebesar 12 miliar. Kami melihat ini meskipun tidak ditargetkan oleh Basarnas, namun semoga menjadi hal positif bagi realisasi BNPP Basarnas tahun selanjutnya.

Dan juga terkait dengan selama untuk BMKG selama dua minggu yang lalu itu di wilayah se-Jabotabek terjadi hujan deras dan juga kami mengikuti beberapa media bahwa pemerintah telah melakukan berbagai opsi teknologi modifikasi cuaca TMC di... ini sebagai upaya mengurangi polusi udara di kawasan ya di kawasan se-Jabotabek. Pertanyaannya adalah anggaran dari kegiatan ini diambilkan dari anggaran pusat BMKG atukah dibebankan kepada daerah. Kalau memang ini dilakukan, tentu kami sepakat karena kami menyadari bahwa kami hingga hari ini masih mengalami ketidakstabilan penerimaan negara dari rupiah murni sebagai dampak dari sejumlah persoalan baik secara nasional maupun juga secara global sehingga kalau dilakukan seperti ini tentunya kami sepakat dan itu bisa menjadi pelatihan ke depan.

Dan rencana itu berapa kali lagi kegiatan modifikasi cuaca ini akan dilakukan oleh BMKG. Dan juga kepada BMKG juga untuk terkait dengan anggaran BMKG 2024 untuk kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN), Sekolah Lapang Iklim (SLI) dan juga Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG) karena memang ini sangat dirasakan manfaatnya dan dampaknya langsung bagi masyarakat yang ada di wilayah Papua. Oleh karena itu, apabila memang memungkinkan kiranya anggaran ditambahkan sesuai target.

Itu yang bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, sekian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya tambahan saja, saya rasa ini tidak perlu ditanggapi sebagai catatan Pak Kepala BMKG dan Kepala Basarnas.

Sekarang kita langsung ke kesimpulan rapat ya. Silakan.

**DRAF KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI V DPR RI
DENGAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SELASA, 29 AGUSTUS 2023.**

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada BMKG dan Basarnas terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Basarnas untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian opini tersebut di tahun mendatang.

2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terhadap alokasi anggaran masing-masing badan dalam RAPBN Tahun 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Surat B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga tahun 2024 sebagai berikut:
 - 1) BMKG, pagu kebutuhan 3,7 triliun tepatnya Rp3.769.612.696.000,00. Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024 sebesar Rp2.769.700.001.000,00 dengan selisih atau ada *backlog* sebesar Rp999.912.695.000,00;
 - 2) Basarnas, pagu kebutuhan sebesar Rp3.600.341.547,000,00. Dan Nota Keuangan di Nota Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp2.085.102.085.000,00 sehingga untuk Basarnas ada *backlog* dari kebutuhan dengan pagu indikatif sebesar Rp1.515.239.462.000,00.

Selanjutnya, Komisi V DPR RI bersama dengan BMKG dan Badan Nasional Pencarian Pertolongan atau Basarnas akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN di DPR RI.

3. Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Badan Nasional Pencarian Pertolongan atau Basarnas untuk membuat rincian kegiatan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 secara detail dan disampaikan kepada Komisi V DPR RI

Komisi V cukup?

(RAPAT: SETUJU)

Pemerintah? BMKG setuju? Basarnas, setuju? Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Dengan dicapainya kesepakatan terhadap kesimpulan rapat, maka selesailah rapat kita pada hari ini.

Saya atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V mengucapkan terima kasih atas atensi kita semua.

Sebelum saya akhiri, saya persilakan mungkin yang mewakili pemerintah, saya persilakan dari Basarnas atau BMKG silakan saja siapa yang dipercaya untuk menyampaikan kata-kata penutup.

**KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA RI
(Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D):**

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Bapak Ketua Komisi V DPR RI, dan
Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR RI yang sangat kami hormati,**

Atas nama pemerintah kami, BMKG dan Plt. Basarnas mengucapkan terima kasih atas seluruh masukan, arahan, dan tadi ada beberapa catatan penting yang perlu kami segera tindaklanjuti. Demikian terima kasih, mohon maaf bila masih ada hal-hal yang kurang, kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja kami.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Saya juga atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V menyampaikan terima kasih kepada kita semua atas berjalannya dengan lancar rapat ini dan mohon maaf karena kalau ada hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan mengucap syukur *alhamdulillah*, rapat ini saya tutup dan dinyatakan selesai.

Terima kasih selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.02 WIB)

JAKARTA, 29 Agustus 2023
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002